
**UPAYA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DALAM MENCEGAH
TIMBULNYA GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN
(STUDI PADA DINAS SOSIAL KOTA PANGKALPINANG)**

Syafitri Ahandini

Universitas Bangka Belitung
Email: syafitriahandini17@gmail.com

Bahjatul Murtasidin, M.Si

Universitas Bangka Belitung
Email: bahjatul@ubb.ac.id

Irvan Ansyari, M.Si

Universitas Bangka Belitung
Email: irvan@ubb.ac.id

Abstrak

Gelandangan, pengemis dan anak jalanan adalah kelompok yang tidak memiliki kemampuan mencukupi kebutuhan pokok, tidak berdaya, ketidakpedulian pada Kesehatan bahkan nilai dan norma seperti mengharapkan belas kasihan orang lain tanpa adanya kerja keras. Ketidakmampuan bersaing dengan masyarakat pada umumnya hingga mencari jalan keluar dengan cara bertahan hidup dengan membangun kegiatan di jalanan. Salah satu Kota Pangkalpinang daerah di Indonesia yang menghadapi permasalahan sosial yang menjadi perhatian umum sehingga memberikan tantangan bagi pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya. Maka untuk mengatasi persoalan ini di keluarkan Peraturan Daerah untuk upaya pencegahan melakukan kegiatan mengemis di Jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 dalam pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Pangkalpinang dan Mengetahui tantangan dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang untuk pencegahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi peraturan daerah oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang dengan model kesesuaian dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik purposive sampling, adapun teknik pengambilan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan masih minim dengan hanya sosialisasi dikarenakan masih banyak gelandangan, pengemis dan anak jalanan, kebanyakan berasal dari luar masyarakat Kota Pangkalpinang yang masih berkeliaran di Kota Pangkalpinang bahkan masyarakat Kota Pangkalpinang masih belum mengetahui adanya peraturan daerah bahkan masih mengutamakan hak pribadi dengan alasan kemanusiaan yang tetap memberikan uang. Hal ini juga disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah yang semestinya memiliki peran strategi terhadap implementasi peraturan daerah.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Gelandangan, Implementasi, Pengemis, dan Peraturan Daerah

Abstract

The Efforts of Pangkalpinang City Government in Preventing the Emergence of Homeless People, Beggars, and Street Children (A Study of the Social Service Office of Pangkalpinang City)

By

Syafitri Ahandini

Homeless individuals, beggars, and street children are vulnerable groups lacking the means to fulfill basic needs, often exhibiting powerlessness, neglect of health, and disregard for social norms. Many rely on the pity of others without engaging in productive work, and their inability to compete in society leads them to survive through informal street-based activities. Pangkalpinang City, one of the urban areas in Indonesia, is grappling with these social issues, which pose significant challenges to the local government's efforts to improve public welfare. To address this, the city enacted Regional Regulation No. 7 of 2015, aimed at curbing street begging and related activities. This study aims to examine the implementation of the regulation in preventing the rise of homelessness, begging, and street children in Pangkalpinang, and to identify the challenges faced by the Social Service Office in its implementation. The research applies Van Meter and Van Horn's (1975) theory of policy implementation, focusing on alignment between policy and practice. Using a qualitative method and purposive sampling, data were collected through interviews, observations, and documentation. Findings reveal that prevention efforts remain minimal, with current actions limited mostly to socialization programs. The continued presence of homeless individuals, beggars, and street children-many of whom come from outside the city-highlights the ineffectiveness of these efforts. Furthermore, public awareness of the regulation is low, and many residents continue to give money for humanitarian reasons. The lack of effective outreach and strategic communication from the government has hindered the proper implementation of the regulation.

Keywords: *Street Children, Homelessness, Implementation, Beggars, Regional Regulation*

PENDAHULUAN

Di berbagai kota baik besar dan kecil, gelandangan, pengemis hingga anak jalanan menjadi persoalan setiap tahun. Gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Provinsi Kepulauan Belitung salah satunya wilayah yang terjangkau persoalan ini, fenomena ini tidak terjadi di Kota Pangkalpinang. Dalam mengatasi persoalan ini Pemerintah Kota Pangkalpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 supaya untuk mencegah munculnya kegiatan mengemis di Kota Pangkalpinang. Ketidakmampuan bersaing dengan masyarakat yang pada umumnya sehingga mencari jalan keluar dengan cara bertahan hidup dengan membangun kegiatan meminta-minta di jalan. Pangkalpinang merupakan kota di Indonesia yang daerah pemerintahan yang mempunyai daya tarik bagi masyarakat sekitar dan pendatang untuk dijadikan tempat tinggal hingga strategis mendapatkan pekerjaan yang layak.

Upaya pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan dilakukan sosialisasi baik untuk masyarakat Kota Pangkalpinang dan kelompok yang berkegiatan di jalanan untuk mengemis maka dilakukan sosialisasi dengan pemasangan banner dengan tujuan memberitahu adanya peraturan daerah mengenai himbauan terkait upaya pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Hal ini memfokuskan bertujuan untuk mencegah sebelum masalah timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Pada tahapan ini memperlihatkan sejauhmana implementasi ini mampu mengatasi masalah sosial serta pentingnya peran pemerintah dan masyarakat mendukung peraturan daerah yang telah ada serta implementasi bisa memperkuat kesadaran bahkan kontribusi masyarakat dalam mendorong upaya pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan sehingga dibutuhkan kolaborasi baik pemerintah dan masyarakat untuk memastikan untuk mengukur serta menjelaskan pencapaian dalam melaksanakan kegiatan membentuk kota yang tertib, aman dan sejahtera.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian ini perlu dilaksanakan melihat fokus pada pencegahan terjadinya fenomena gelandangan, pengemis dan anak jalanan seperti tindakan yang diambil untuk menghindari munculnya masalah ini untuk tidak terjebak dalam kondisi yang membuat menjadi gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta melihat kontribusi masyarakat dalam mendukung pencegahan pada kelompok yang mengalami kesulitan pada keluarga kurang mampu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang untuk menciptakan upaya pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang terperangkap pada kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Sebuah rangkaian tahapan yang digunakan secara ilmiah dan sistematis, menggunakan pendekatan yang rasional untuk menyesuaikan cara pola pikir manusia. Metode penelitian ini menggunakan keterlibatan pengamatan secara mendalam pada fenomena yang ada bahkan pemahaman pada proses yang diterapkan penelitian sebagai menghasilkan data yang sesuai dan relevan. Metode penelitian di definisikan sebagai Metode penelitian ini menggunakan keterlibatan pengamatan secara mendalam pada fenomena yang ada bahkan pemahaman pada proses yang diterapkan penelitian sebagai menghasilkan data yang sesuai dan relevan. (Sugiyono, 2011).

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode Penelitian kualitatif adalah proses menganalisis proses penyimpulan pada hubungan antar fenomena yang diamati. Metode pendekatan kualitatif dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Sehingga Adapun tujuan dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini untuk mengetahui fenomena yang secara mendalam upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

Waktu dan Tempat Penelitian

Khususnya untuk penelitian kualitatif, waktu dan tempat penelitian perlu dituliskan secara jelas (untuk penelitian kuantitatif, juga perlu). Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pangkalpinang dengan melihat focus upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang oleh Dinas Sosial dalam upaya pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Target/Subjek Penelitian

Target/subjek penelitian (untuk penelitian kualitatif) atau populasi-sampel (untuk penelitian kuantitatif) perlu diurai dengan jelas dalam bagian ini. Perlu juga dituliskan teknik memperoleh subjek (penelitian kualitatif) dan atau teknik samplingnya (penelitian kuantitatif). Subjek penelitian yang dijadikan tujuan penelitian pihak yang menjadi sasaran penelitian yakni Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Satpol PP Kota Pangkalpinang, Masyarakat Kota Pangkalpinang,

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Satpol PP Provinsi Bangka Belitung, dan Kelompok sasaran.

Penelitian ini akan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan informan yang sesuai dilakukan dapat mendapatkan dan memilih yang relevan dibidangnya, sehingga hasil penelitian yang dilakukan peneliti akan objektif dan valid.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber atau cara, yakni: Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

1. Wawancara merupakan Kegiatan yang digunakan peneliti dengan informan yang memiliki ide gagasan dan informasi dalam pertanyaan yang diajukan sehingga mempunyai makna dalam suatu topik.
2. Observasi adalah Tahapan proses yang berkaitan dengan memberikan secara mendalam untuk peneliti memahami sesuai masalah yang sedang diteliti, sehingga dapat membantu menentukan arah yang sesuai dengan penelitian.
3. Dokumentasi merupakan metode informasi dan data berbentuk media misalnya arsip, dokumentasi, buku, tulisan angka dan gambar yang berkaitan dengan laporan dan bukti yang relevan dalam mendukung penelitian tersebut.

Teknik Analisis Data

Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian, perlu dijabarkan dengan jelas melalui tahapan dalam penyusunan ini pengelompokan data, pemilihan informasi relevan, identifikasi pola, serta kesimpulan sehingga peneliti dapat memahami hasil yang baik oleh semua pihak. Menurut Bigdan dan Biklen, analisis data adalah sebuah proses yang terlibat dalam berbagai proses penting, dimulai dari pengumpulan data sampai mengelompokkan dalam bentuk yang terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti berupaya menjalankan, mengelompokkan hingga memilih data untuk bisa dikelola dengan baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam Mencegah Timbulnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

Penerapan kebijakan upaya pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Pangkalpinang tentu diiringi dengan dasar hukum yang sah, yaitu Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Gelandangan, Pengemis dan anak jalanan. Selain itu ada juga Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2015 dalam Upaya Pencegahan timbulnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Dalam pasal pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa dijelaskan pemerintah Kota Pangkalpinang melarang kepada masyarakatnya untuk tidak menjadi gelandangan dan pengemis, serta dilarang untuk memaksa orang lain untuk mengemis dan melarang untuk memberikan uang atau barang kepada mereka. Artinya, Kegiatan memberi dan melakukan kegiatan dijalan tidak boleh di Kota Pangkalpinang sehingga peraturan ini jelas mendukung upaya pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Van Meter dan Van Horn mengatakan ada 4 indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar keberhasilan dan sasaran kebijakan menetapkan pada pengurangan jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Namun dengan melakukan evaluasi tiap semester hasil temuan bahwa tingkat keberhasilan cenderung fluktuatif yang biasa terjadi di kegiatan keagamaan seperti pada puasa dan lebaran. Gambaran pada masih naik turunnya angka bahwa standar masih belum sepenuhnya mengatasi di lapangan sehingga standar keberhasilan memerlukan penyesuaian serta solusi yang perlu di perkuat supaya tujuan implementasi dapat tercapai.

2. Sumber daya

Sumber daya baik secara sumber daya manusia dalam jumlah bisa dianggap sudah memadai, tantangan dalam sumber daya yang dihadapi minimnya akibat keterbatasan anggaran yang mengalami pengurangan sehingga keadaan jika dilihat belum memenuhi secara optimal.

3. Komunikasi antar Organisasi dan penguat aktivitas

Komunikasi serta koordinasi tiap instansi dalam mendukung berjalannya implementasi dalam temuan hasil dinas sosial dengan Satpol PP terus melaksanakan koordinasi yang cukup baik bahkan kegiatan ada kegiatan gabungan baik dengan Dinas Sosial Kota, Dinas Sosial Provinsi serta Satpol PP Kota dan Satpol PP Provinsi yang dilakukan sesuai dengan fungsi masing-masing.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini memerlukan bahwa bagaimana komitmen yang dijalankan dinas sosial berdasarkan peraturan daerah upaya pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan masih bertolak belakang dengan keterbatasan anggaran yang mengalami pengurangan serta minimnya dorongan masyarakat yang belum optimal sehingga masih berada pada budaya merasa mudah memberi tetapi tidak memberikan pada tempat seharusnya sehingga jika tidak tepat sasaran maka pemberian yang dilakukan masyarakat digunakan hanya membuat mereka malas untuk bekerja sehingga persoalan ini terus melebar. Tidak hanya masyarakat adanya sikap penolakan yang dirasa menghakimi para pengemis menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan ini.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam sisi secara kondisi sosial, ekonomi dan politik mempengaruhi dalam implementasi yang dapat dilihat dari keadaan kemiskinan, minimnya tempat pekerjaan hingga pola hidup yang pada kelompok yang melakukan kegiatan dijalanan seperti mengemis masih menjadi persoalan dasar yang memerlukan waktu serta tidak mudah diselesaikan hanya menggunakan pendekatan peraturan.

6. Disposisi Implementator

Disposisi implementator dari instansi terkait memahami bahwa peraturan daerah instrument penting dalam mencegah persoalan keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dengan melaksanakan lebih terarah dengan sosialisasi, tetapi pemahaman implementasi belum cukup baik sehingga belum maksimalnya dimana masyarakat yang sering memberi uang kepada pengemis serta masyarakat juga merasa sosialisasi dari yang dilakukan dinas terkait berkaitan dengan hak masyarakat dibatasi atau persoalan pertimbangan kemanusiaan dan nilai aturan.

B. Tantangan upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam Mencegah Timbulnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

Kebijakan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam melarang adanya kegiatan menggelandang dan mengemis di Wilayah Kota Pangkalpinang melalui Upaya Pencegahan Timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan mempunyai bermacam pandangan dari masyarakat. Sebagian masyarakat menyetujui dengan kebijakan pemerintah kota tetapi yang menolaknya. Alasan utama bagi masyarakat yang kurang setuju karena itu hak pribadi dan bertolak dengan hak kemanusiaan. Sosialisasi merupakan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam sebuah kebijakan, hal ini diharapkan informasi dari sosialisasi dapat diterima oleh masyarakat kota Pangkalpinang. Pemerintah Kota Pangkalpinang oleh Dinas Sosial juga berusaha mensosialisasikan melalui pemasangan banner himbauan pelarangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghindari terjadinya terganggunya ketentraman di Kota Pangkalpinang dengan adanya kegiatan mengemis. Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat beberapa tantangan dalam upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mencegah timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jlanan oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang. Pertama, Minimnya pemahaman masyarakat tidak mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah. Peneliti

menemukan masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan itu setelah peneliti memberi tahu adanya peraturan daerah masih baru mengetahui dengan memberi tahu bahwa seperti di dekat pasar Higenis Selindung Pangkalpinang terpasang banner tersebut. Maka minimnya pemahaman ini seolah merasa telah berbuat baik, sebagai implementator utama dinas sosial melakukan sosialisasi melalui himbuan yang dirasa belum cukup mengubah mindset masyarakat yang terus terperangkap pada budaya yang salah sasaran pada saat memberi uang kepada kelompok persoalan ini sering disalahpahami, masyarakat merasa memiliki rasa kemanusiaan serta hak pribadi. Kedua, Cara dengan mengambil kesempatan (modus) dalam kegiatan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Keadaan seperti ini menjadi tantangan karena kesulitan dalam membedakan yang betul-betul terindikasi kelompok gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang membutuhkan bantuan atau yang dengan sengaja menipu rasa kepedulian dari masyarakat, hal ini yang membuat Pemerintah bahkan masyarakat kesulitan akibat pelaku menyembunyikan identitas hingga tidak semua oknum dapat ditindak lanjuti. Maka upaya pencegahan wajib dilaksanakan sehingga pemerintah memerlukan upaya alternatif dalam mengatasi timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dapat bersifat generalisasi temuan sesuai permasalahan penelitian, dapat pula berupa rekomendasi untuk langkah selanjutnya. Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait “Upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam Mencegah Timbulnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan (Studi Pada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang)”, yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam Mencegah Timbulnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan (Studi Pada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang upaya pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan masih minim dengan hanya sosialisasi dikarenakan masih banyak gelandangan, pengemis dan anak jalanan, kebanyakan berasal dari luar masyarakat Kota Pangkalpinang yang masih berkeliaran di Kota Pangkalpinang bahkan masyarakat Kota Pangkalpinang masih belum mengetahui adanya peraturan daerah bahkan masih mengutamakan hak pribadi dengan alasan kemanusiaan yang tetap memberikan uang. Hal ini juga disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah yang semestinya memiliki peran strategi terhadap implementasi peraturan daerah. Dengan demikian kajian tersebut guna melihat apakah implementasi dalam studi terhadap upaya pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Pangkalpinang dapat dikatakan efektif atau malah sebaliknya.

Saran

Terkait permasalahan kurangnya ketidakpahaman dan pengetahuan informasi di Kota Pangkalpinang terkait upaya pemerintah kota Pangkalpinang dalam mencegah timbulnya gelandangan pengemis dan anak jalanan, setidaknya meningkatkan sosialisasi pada kelompok di daerah asal serta kawasan Kota Pangkalpinang menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, hingga Tiktok, serta media elektronik atau media cetak. Berawal dari dunia pendidikan bisa ditanamkan dan berikan sosialisasi berupa pemahaman secara akademik untuk memperluas pandangan pada kelompok sasaran sehingga mereka dapat memahami persoalan sosial yang ada di masyarakat seperti timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Bagi Penelitian selanjutnya disarankan dapat membahas kajian yang sama dengan lebih

memfokuskan pada bentuk kebijakan secara evaluasi khusus aspek efektivitas Ketika kebijakan di implementasikan.

Pemerintah daerah harus ikut serta merangkul berbagai kalangan seperti mengkoordinasi ke tokoh masyarakat setempat misalnya di lingkungan RT/RW untuk dapat membantu mencapai tujuan dengan menginformasikan kepada masyarakat. Bahkan diharapkan masyarakat bisa lebih peduli dan menerima pemahaman dari peraturan daerah dengan tidak memberikan secara langsung bantuan baik uang bahkan barang dijalanan hal ini memutus ketergantungan yang menjadikan jalanan sebagai mencari nafkah, yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.

TENTANG PENULIS

Nama : Syafitri Ahandini
Tempat/Tanggal Lahir : Belinyu, 08 Januari 2003
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kecamatan Belinyu
Agama : Islam
Email : syafitriahandini17@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gaffar, A. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik* (p. 22). Rineka Cipta.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Mulyadi, D. (2018). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Pandoyo. (2018). *Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi* (pp. 43–67). Rake Sarasin.
- Rosad, S. dan. (2020). *Manajemen Pemasaran*. 5(3), 248–253.
- Soetomo. (2008). *Masalah Sosial dan Pemecahannya*. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (p. 2). Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara* (p. 67). Sinar Grafika.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS

Skripsi

- Firdaus, W. (2018). Analisis Kritis Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penanganan

Gelandangan Pengemis (Gepeng) oleh Dinas Sosial Kota Serang (PerDa Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat). *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*, 1(12). <http://eprints.untirta.ac.id/1010/>

Rohmaniyat, R. (2016). *"Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Lembaga Sosial Hafara* (p. 4). Universitas Negeri Yogyakarta.

Jurnal

Adolph, R. (2016). *Kebijakan Perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan*. 1–23.

Afifah, N. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Di ...*. 9(4), 321–334. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/11/NadaAfifah\(11-10-21-02-58-20\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/11/NadaAfifah(11-10-21-02-58-20).pdf)

Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). *Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012)*. 8(2), 88–101.

Hildegunda, W. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009)*. 53(9), 1689–1699.

Pradana, A. K. A., & Suryaningsih, M. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Kota Semarang Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis*. 6(3), 1–12.

Pratama, W. Y. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)* (p. Journal Publicuho). Journal Publicuho. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156>.

Artikel dan Media Online

Agustika, S. (2025). *Angka Kemiskinan di Bangka Belitung Naik Tapi Masih Dibawah Rata-Rata Nasional*. [bangka.tribunnews.com. https://bangka.tribunnews.com/2025/01/15/angka-kemiskinan-di-bangka-belitung-naik-tapi-masih-dibawah-rata-rata-nasional](https://bangka.tribunnews.com/2025/01/15/angka-kemiskinan-di-bangka-belitung-naik-tapi-masih-dibawah-rata-rata-nasional)

Faberta, T. R. (2025). *Jumlah Pengemis Semakin Banyak, Satpol PP Pangkalpinang Lakukan Penertiban*. [faktaberita.co.id. https://www.faktaberita.co.id/jumlah-pengemis-semakin-banyak-satpol-pp-pangkalpinang-lakukan-penertiban/](https://www.faktaberita.co.id/jumlah-pengemis-semakin-banyak-satpol-pp-pangkalpinang-lakukan-penertiban/)

Nugroho, R. (2024). *Dinsos Pangkalpinang Ingatkan Masyarakat Tak Beri Uang Kepada Pengamen dan Pengemis*. [Bangkapos. https://bangka.tribunnews.com/2024/05/31/dinsos-pangkalpinang-ingatkan-masyarakat-tak-beri-uang-kepada-pengamen-dan-pengemis](https://bangka.tribunnews.com/2024/05/31/dinsos-pangkalpinang-ingatkan-masyarakat-tak-beri-uang-kepada-pengamen-dan-pengemis)

Saputra, E. (2024). *Dinsos Pangkalpinang Ingatkan Masyarakat Tak Beri Uang Pada Pengamen dan Pengemis, Ini Alasannya* (Dedy Qurni). [bangka.tribunnews.com. https://bangka.tribunnews.com/2024/06/01/dinsos-pangkalpinang-ingatkan-masyarakat-tak-beri-uang-pada-pengamen-dan-pengemis-ini-alasannya](https://bangka.tribunnews.com/2024/06/01/dinsos-pangkalpinang-ingatkan-masyarakat-tak-beri-uang-pada-pengamen-dan-pengemis-ini-alasannya)

Usdati. (2025). *Meresahkan Masyarakat, Tim PATWAL Turun ke Jalan Menyisir Keberadaan Gepeng*. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. <https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/meresahkan-masyarakat-tim-patwal-turun-ke-jalan-menyisir-keberadaan-gepeng>

Peraturan dan Undang-undang

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2015 tentang penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unsur pelaksana teknis